

ANALISIS KETERCAPAIAN KEBIJAKAN EKONOMI MARITIM DI MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Dian Eka Puspita Muhtar^{1*}, Agussalim Burhanuddin²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

*e-mail *Corresponding Author*: dianekapuspitamuhtar@gmail.com¹,
agus.unhas@gmail.com²

ABSTRAK

Indonesia memiliki tujuh pilar kebijakan kelautan yang salah satu kebijakannya fokus terhadap kebijakan ekonomi maritim dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat maritim. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu daerah di Indonesia yang dikenal sebagai daerah maritim. Diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar menerapkan kebijakan kelautan yang dibantu oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam penerapannya tentu ada tujuan yang ingin dicapai dan apakah tujuan dari penerapan kebijakan ini tercapai atau tidak. Penelitian dalam jurnal ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data secara studi literatur dengan membaca buku – buku ataupun jurnal yang relevan dengan kasus penerapan kebijakan ekonomi maritim. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis terkait ketercapaian penerapan kebijakan ekonomi maritim di Kabupaten Kepulauan Selayar yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat maritim di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan sudah tercapai, namun belum maksimal dikarenakan oleh kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan teknologi, dan keterbatasan finansial dari masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kata kunci: Kebijakan Ekonomi Maritim; Kesejahteraan Masyarakat; Masyarakat Maritim

ABSTRACT

Indonesia has seven maritime policy pillars, one of which focuses on maritime economic policy in improving the welfare of society, especially maritime communities. Selayar Islands Regency is one of the regions in Indonesia which is known as a maritime region. It is known that Selayar Islands Regency implements marine policies assisted by the Selayar Islands Regency Fisheries Service. In its implementation, of course there is a goal to be achieved and whether the goal of implementing this policy is achieved or not. The research in this journal is qualitative research by collecting data through literature studies by reading books or journals that are relevant to the case of implementing maritime economic policy. The aim of this

research is to analyze the achievements of implementing maritime economic policies in the Selayar Islands Regency which focuses on improving the welfare of the maritime community in the Selayar Islands Regency. The research results show that the implementation of economic policy in Selayar Islands Regency can be said to have been achieved, but it has not been optimal due to the lack of facilities and infrastructure, technological limitations and financial limitations of the people in Selayar Islands Regency.

Keywords: *Maritime Economic Policy; Public welfare; Maritime Society*

1. Pendahuluan

Indonesia diketahui memiliki wilayah lautan yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratannya, di mana wilayah daratannya hanya mencapai 2,01 km, oleh karena itu Indonesia dapat dikatakan sebagai negara maritim. Maritim diketahui berasal dari bahasa inggris yaitu *maritime* yang memiliki arti yaitu navigasi atau bahari. Dari kata tersebut maka lahirlah istilah negara maritim. Negara maritim sendiri menjadi salah satu tipe negara yang ada di dunia. Negara dapat dikatakan sebagai negara maritim karena melihat pergerakan suatu negara terdapat pada sektor perairan.

Secara umum, negara maritim ialah negara yang memiliki luas wilayah lautan lebih banyak dibanding wilayah daratannya. Selain itu, orang awam ataupun ilmuwan menyebut bahwa negara maritim ialah suatu negara yang terdiri dari banyak pulau sehingga munculnya istilah negara kepulauan, dimana negara tersebut merupakan negara maritim yang dikelilingi banyak pulau. Sebagai negara maritim, tentunya Indonesia memiliki masyarakat maritim yang tersebar hampir di seluruh bagian di Indonesia. Masyarakat maritim ini mengacu pada komunitas atau masyarakat yang bergantung pada laut untuk mata pencaharian hingga aktivitasnya. Secara umum mencakup pada mata pencaharian nelayan, pelaut, pedagang, dan sebagainya. Istilah masyarakat maritim ini juga selalu mengarah pada masyarakat atau komunitas yang tinggal di wilayah pesisir ataupun pulau – pulau.

Terdapat salah satu kabupaten di Indonesia yang masyarakatnya dapat dikatakan sebagai masyarakat maritim ataupun masyarakat pesisir, yaitu Kabupaten Selayar. Masyarakat di daerah Kabupaten Selayar sangat berkaitan dengan sektor maritim dan lingkungan pesisir. Cukup banyak tantangan yang dihadapi dari masyarakat Kabupaten Selayar terutama pada perekonomian mereka. Hal tersebut dikarenakan oleh keterbatasan mereka terkait mata pencaharian sehingga dapat terpengaruh pada perekonomian masyarakat di Kabupaten Selayar. Oleh karena itu, pihak pemerintahan membuat kebijakan ekonomi maritim guna mensejahterakan masyarakat di daerah maritim.

Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan strategi guna memajukan sektor ekonomi maritim dan juga meningkatkan kesejahteraan komunitas maritimnya, seperti membangun jalur laut, merancang pelabuhan laut dalam, mempromosikan industri perkapalan dalam negeri, serta berpartisipasi aktif dalam kerjasama *ASEAN Connectivity*. Salah satu tujuan utama di balik upaya ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di daerah pesisir. Namun, hasil implementasi kebijakan ekonomi maritim tidak selalu sesuai dengan harapan, dan masih banyak daerah di mana pencapaian tujuan tersebut belum optimal.

State the art dalam jurnal ini ialah ketercapaian dari kebijakan ekonomi maritim dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim khususnya di daerah Kabupaten Selayar. Hal ini menjadi salah satu topik yang dapat di kaji lebih lanjut, karena hingga saat ini ketercapaian dari tujuan ekonomi maritim masih “abu – abu”. Oleh karena itu, dapat ditentukan bahwa tujuan dari penulisan jurnal ini ialah untuk menganalisa bagaimana ketercapaian dari penerapan kebijakan ekonomi maritim dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim khususnya pada Kabupaten Selayar. Sehingga dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait hal – hal apa saja yang dapat diperbaiki guna mencapai apa yang menjadi tujuan dari ekonomi maritim.

2. Tinjauan Pustaka

Teori pembangunan maritim didasarkan pada adanya gagasan pengembangan sektor maritim untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat maritim. Teori pembangunan maritim ini merupakan teori yang menekankan bahwa betapa pentingnya pengembangan transportasi laut, pelabuhan laut, dan hal – hal yang relevan dengan sektor maritim. Teori pembangunan maritim ini membantu dalam perumusan kebijakan dan strategi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut dan pengembangan sektor maritim yang akan diolah oleh masyarakat maritim. Teori pembangunan maritim ini juga di dukung oleh hal - hal penting, yaitu terkait dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang mana hal ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam sektor maritim. Selanjutnya ialah pemberdayaan masyarakat maritim yang mencakup peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya laut, pelatihan, pendidikan, dan sebagainya.

Ekonomi maritim ialah segala kegiatan ekonomi yang dilakukan di kawasan pesisir ataupun kawasan maritim yang berkaitan dengan industri kapal, pelabuhan, pelelangan ikan, pariwisata laut, dan sebagainya. Pada umumnya, kebijakan ekonomi maritim adalah inisiatif yang diimplementasikan oleh pemerintah negara kepulauan dengan maksud untuk meratakan distribusi ekonomi, terutama bagi

komunitas maritim di dalamnya. Konsep kebijakan ekonomi maritim yaitu pengembangan sektor maritim dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat maritim. Kebijakan – kebijakan yang dipublikasikan seringkali mencakup berbagai strategi seperti pariwisata bahari hingga pengelolaan sumber daya kelautan yang bisa dijadikan mata pencaharian bagi masyarakat maritim.

Secara umum, penduduk di Kabupaten Selayar mengandalkan laut sebagai sumber kehidupan utama mereka, sehingga seringkali disebut sebagai komunitas nelayan. Di wilayah ini, masyarakat memiliki berbagai profesi yang berkaitan dengan kegiatan maritim, termasuk para pemilik perahu, pekerja nelayan, nelayan pancing, nelayan yang menggunakan perangkap, dan individu yang terlibat dalam pengumpulan ikan dari para nelayan yang baru pulang dari melaut. Selain itu, masyarakat di Kabupaten Selayar juga ada yang berprofesi rangkap seperti sebagai nelayan, petani, dan peternak. Dilain aspek seperti pendidikan dan transportasi diketahui penerapannya belum merata sehingga menjadi salah satu faktor penyebab masih adanya desa di Kabupaten Selayar yang belum meningkat kesejahteraannya. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menjadi pendekatan yang digunakan karena pendekatan ini sangat baik dalam melihat fenomena pada masyarakat. Untuk pengambilan data penelitian, dilakukan dengan cara studi literatur. Pengumpulan data studi literatur ini dilakukan dengan literasi dari buku – buku ataupun jurnal – jurnal yang relevan atau ada kaitan dengan bahan analisis.

3. Metodologi

penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menjadi pendekatan yang digunakan karena pendekatan ini sangat baik dalam melihat fenomena pada masyarakat. Untuk pengambilan data penelitian, dilakukan dengan cara studi literatur. Pengumpulan data studi literatur ini dilakukan dengan literasi dari buku – buku ataupun jurnal – jurnal yang relevan atau ada kaitan dengan bahan analisis.

4. Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Selayar yang menjadi salah satu daerah maritim di Indonesia tentunya menerapkan kebijakan – kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi maritim guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Perlu diketahui kembali bahwa terdapat tujuh pilar utama dari kebijakan kelautan Indonesia, yang salah satunya ialah “Ekonomi, Infrastruktur, dan Peningkatan Kesejahteraan” yang merupakan kebijakan kelautan yang fokus terhadap ekonomi masyarakat untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan tersebut terdapat fokus dimana penerapan kebijakan ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan dalam aspek perekonomian masyarakat. Dalam konteks upaya meningkatkan kesejahteraan, pemerintah telah menetapkan serangkaian program kunci sebagai bagian dari strategi pelaksanaan kebijakan peningkatan kesejahteraan, yang meliputi hal berikut:

- A. Pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam;
- B. Peningkatan kemampuan dan kapasitas bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam;
- C. Penyediaan kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, lahan, dan pembiayaan untuk kepentingan pengembangan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam;
- D. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di bidang kelautan, khususnya pada sektor perikanan, energi, dan pariwisata bahari; dan
- E. Peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan untuk pariwisata bahari secara berkelanjutan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam kerangka kebijakan ini, kita dapat mengamati bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, kita juga dapat menilai pencapaian yang terkait dengan kebijakan tersebut..

Berdasarkan update pada tahun 2022, diketahui bahwa penduduk masyarakat Kabupaten Selayar mencapai 139.145 jiwa berikut lampiran statistiknya.

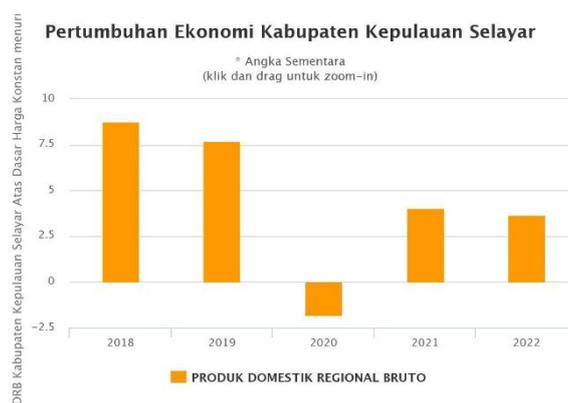


Gambar 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017-2022

(Sumber: <https://selayarkab.bps.go.id/>)

Banyaknya jumlah masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan kemungkinan bisa terjadi ketidakmerataan dari penerapan kebijakan ekonomi

tersebut dan memungkinkan tidak tercapainya secara maksimal penerapan kebijakan ekonomi di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Ketercapaian penerapan kebijakan ekonomi dari Kabupaten Kepulauan Selayar terlebih dahulu dapat dilihat melalui perkembangan ekonomi yang dilampirkan melalui Badan Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar.



Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018-2022
(Sumber: <https://selayarkab.bps.go.id/>)

Berdasarkan data statistik dari Badan Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan dari tahun 2021 ke 2022. Penurunan tersebut sebesar 0,37%, dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 4,02% dan turun sebesar 0,37% sehingga pada tahun 2022 menjadi 3,67%. Dari data statistik tersebut dapat dikatakan bahwa ketercapaian dari penerapan kebijakan ekonomi maritim di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebetulnya belum tercapai secara maksimal dilihat dari perkembangan perekonomian dari tahun 2020 hingga 2022. Dalam kurun waktu tiga tahun terjadi dua kali penurunan pertumbuhan ekonomi. Perlu diketahui bahwa perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar bersumber pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.

Terlihat dari sumber PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menunjukkan bahwa hasil dari sumber daya laut mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Hasil sumber daya laut yaitu ikan bisa menjadi salah satu hasil sumber daya laut yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim Kabupaten Kepulauan Selayar melalui perekonomian dengan cara seperti penjualan ikan. Berdasarkan program – program pemerintah yang telah dipaparkan, dapat di analisa kembali terkait ketercapaian dari penerapan kebijakan ekonomi maritim terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu sebagai berikut.

- A. Pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Dalam membantu keberhasilan dari penerapan kebijakan ini, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengajak Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menerapkan kebijakan ini. Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan ini, Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar telah meluncurkan sebuah program strategis, yaitu proyek Pengembangan Kawasan Industri Perikanan Terpadu di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Proyek ini diterapkan melalui dua pendekatan, yakni optimalisasi pengembangan dan pengelolaan kawasan perikanan yang sudah ada, seperti TPI Bonehalang dan pusat-pusat pendaratan ikan lainnya, serta pembangunan Kawasan Perikanan baru yang ditempatkan lebih dekat dengan wilayah penangkapan, mengintegrasikan seluruh rangkaian bisnis perikanan, mulai dari penangkapan hingga pengolahan dan distribusi produk. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menciptakan efek pengganda ekonomi bagi masyarakat. Namun, keberhasilan implementasi proyek ini terhambat oleh kurang optimalnya kerjasama antara nelayan tangkap dan pelaku usaha perikanan di daerah tersebut. Peningkatan kemampuan dan kapasitas bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Untuk kebijakan ini pemerintah telah melakukan upaya dengan memberikan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan serta memberikan bantuan pada sejumlah kelompok nelayan seperti bantuan sarana dan alat tangkap guna meningkatkan kemampuan dan kapasitas para nelayan.
- B. Penyediaan kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, lahan, dan pembiayaan untuk kepentingan pengembangan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Terkait program ini, diketahui bahwa sejumlah lembaga dan program pelatihan telah diterapkan untuk meningkatkan pemahaman bagi para nelayan hingga petambak garam terkait praktik perikanan. Selain itu, untuk penyaluran akses informasi telah dapat diperoleh melalui berbagai penyalur seperti radio komunitas dan kantor pemerinah setempat. Beberapa lembaga juga mulai dikerahkan untuk membantu masyarakat di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang membutuhkan pembiayaan untuk usaha nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam melalui koperasi dan subsidi pemerintah.
- C. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di bidang kelautan, khususnya pada sektor perikanan, energi, dan pariwisata bahari. Program ini merupakan salah satu program yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dimana dalam program ini telah dilakukan upaya perluasan di berbagai

sektor seperti pada sektor perikanan dimana dilakukan pengembangan pasar lokal dan ekspor untuk produk-produk perikanan. Pada sektor energi, saat ini dilakukan upaya perluasan seperti pemanfaatan potensi energi terbarukan, seperti energi matahari hingga ombak guna memasok listrik. Terakhir, pada sektor pariwisata, dilakukan perluasan seperti pengembangan destinasi seperti *diving*, *snorkeling*, dan pariwisata pulau di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun, belum tercapai secara maksimal karena adanya berbagai hambatan dari berbagai sektor seperti adanya *overfishing*, perizinan dan regulasi yang cukup kompleks, dan konservasi lingkungan.

- D. Peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan untuk pariwisata bahari secara berkelanjutan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Program peningkatan sumber daya laut untuk pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan sebuah langkah yang cukup penting untuk mempromosikan ekowisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut melalui bekerja di bidang ekowisata. Namun dalam program ini, terdapat banyak hambatan dimana apabila terjadi *overtourism* di daerah tersebut maka dapat merusak ekosistem laut dan menghambat mata pencaharian masyarakat maritim yang lainnya. hambatan kedua ialah hingga saat ini Kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki infrastruktur yang memadai dalam membangun ekowisata seperti kurangnya pelabuhan, dermaga, dan fasilitas pengembangan ekowisata yang lainnya.

Perlu diketahui bahwa saat ini Kabupaten Kepulauan Selayar berhasil menarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut, dimana berdasarkan statistik dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar pada ahun 2021 mengalami peningkatan yang bagus terutama pada bulan Juni dan Agustus pada tahun 2021, berikut lampiran statistiknya.



Gambar 2. Jumlah Pengunjung Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021
(Sumber: <https://selayarkab.bps.go.id/>)

Dalam penerapan program kebijakan ekonomi maritim, tentunya memiliki banyak hambatan baik dari pihak masyarakat maupun pihak pemerintahan di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar maupun Indonesia, yaitu:

- A. Kurangnya konsep kebijakan ekonomi maritim yang jelas dan kompeherensif. Dimana Indonesia masih belum mampu merumuskan konsep kebijakan maritim yang tepat sehingga masih banyak penerapan kebijakannya yang belum maksimal atau tidak tercapai sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat khususnya di daerah maritim yang serinngkali tertinggal.
- B. Terdapat kelemahan pada pengelolaan sumber daya laut termasuk dalam penangkapan ikan dan adanya pembangunan atau praktik yang tidak berkelanjutan.
- C. Keterbatasan dalam mendapatkan akses terhadap pengetahuan, teknologi, informasi, lahan, serta sumber pendanaan untuk mengembangkan usaha di kalangan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam juga menjadi hambatan dalam melaksanakan kebijakan ekonomi maritim. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kendati terdapat upaya dalam menyebarkan informasi, tetap saja banyak daerah terpencil yang belum mendapatkan manfaat penuh dari upaya tersebut.
- D. Terakhir, terdapat kelemahan dalam kerangka hukum kegiatan maritim termasuk pada peraturan mengenai keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim.

Sebagai negara maritim pastinya Indonesia telah mengetahui berbagai hambatan yang ada dan untuk melindungi daerah ataupun masyarakat maritim, Indonesia perlu solusi dalam menghadapi tantangan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- A. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap segala hal yang menyimpang terhadap penerapan kebijakan ekonomi maritim dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim.
- B. Memberikan pendidikan serta pelatihan kepada masyarakat di Kabpaten Selayar tentang praktik perikanan, teknologi perikanan, hingga budidaya hasil sumber daya laut.
- C. Meningkatkan pembangunan infrastruktur mariitim atau kelautan seperti pelabuhan, fasilitas pengolahan ikan, dan pasar ikan modern.
- D. Perlunya mengembangkan paiwisata bahari di Kabupaten Kepulauan Selayar agar dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat lokal di Kabupaten Kepulauan Selayar pada sektor jasa pariwisata.
- E. Pemerintah harus memberikan dukungan keuangan kepada nelayan dan pelaku usaha maritim di Kabupaten Kepulauan Selayar agar dapat melakukan peningkatan logistik dari perusahaan atau laut nelayan.

Berdasarkan hasil penelitian secara studi literatur, bisa dilihat bahwa penerapan kebijakan ekonomi maritim di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah dapat dikatakan tercapai, namun belum maksimal karena beberapa hambatan, pertama ialah faktor dari kurangnya infrastruktur yang memadai, meskipun telah dikatakan bahwa pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah mulai dijalankan, namun hasil dari pembangunan tersebut belum bisa digunakan karena masih adanya sarana dan prasarana yang belum jadi. Kedua, dikarenakan oleh keterbatasan teknologi di Kabupaten Kepulauan Selayar, hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana keadaan beberapa bagian dari Kabupaten Kepulauan Selayar yang belum baik secara teknologi dan sinyal di beberapa daerah masih belum stabil. Ketiga ialah adanya keterbatasan finansial di beberapa daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan update pada tahun 2022 dimana masih ada 16,74 ribu jiwa yang berada di bawah garis kemiskinan.

5. Simpulan

Analisis terhadap ketercapaian penerapan kebijakan ekonomi maritim dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan sudah tercapai namun belum secara sempurna. Hal tersebut terjadi karena masih adanya masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang masih berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 12,24% atau sebanyak 16,74 ribu jiwa berdasarkan *update* pada tahun 2022. Berdasarkan update tersebut, pada tahun 2022 Kabupaten Kepulauan Selayar menduduki peringkat ke-6 Kabupaten/Kota termiskin se-Sulsel berdasarkan *update* 2022 tepat di bawah Kabupaten Enrekang. Selain itu, penyebab dari belum tercapainya penerapan kebijakan ekonomi secara maksimal di Kabupaten Kepulauan Selayar ialah pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Kepulauan Selayar yang belum selesai dan keterbatasan teknologi yang menghambat masyarakat dalam mengakses hal – hal penting terkait pengembangan pengelolaan sumber daya laut serta hal – hal yang berkaitan dengan mata pencaharian penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Daftar Referensi

- [1] N. Achmad, 'Fishermen and Poverty: Social Capital Analysis of Fishermen's Survival in Medan City Nelayan dan Kemiskinan: Analisis Modal Sosial Bertahan Hidup Nelayan di Kota Medan'.
- [2] Firman, "<https://mail.kepulauanselayarkab.go.id/>," 19 March 2019. [Online]. Available: <https://mail.kepulauanselayarkab.go.id/berita-dr-h-zainuddin-sh-mh--terwujudnya-masyarakat-maritim-yang-sejahtera-adalah-harga-mati-di-tahun-2021.html>.

- [3] Isdaini, 9 August 2022. [Online]. Available: https://repositori.uin-alauddin.ac.id/22194/1/ISDAINI_30400118144.pdf.
- [4] Ngadi, "https://www.researchgate.net/," 22 November 2013. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/317569367_DINAMIKA_PENDAPATAN_PENDUDUK_DI_WILAYAH_PESISIR_KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.
- [5] T. S. Ngadi and M. Imron, *DINAMIKA SOSIAL EKONOMI: Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Kepulauan Selayar*, Jakarta: PT.Lauser Cita Pustaka, 2011.
- [6] Ibnu, "https://accurate.id/," 3 May 2021. [Online]. Available: <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/ekonomi-maritim/>. 'Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Selayar 2022'.
- [7] KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA, *KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA*, Jakarta Pusat: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA.
- [8] P. D. B. K. d. S. K. PPN/Bappenas, *Kebijakan Nasional Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan dalam Dokumen Perencanaan*, Balikpapan: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.
- [9] D. Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar and D. *KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR* Ji KHAhmad Dahlan KompTPI Bonehalang Benteng-Selayar, 'Laporan Akuntalibitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 LAKIP 2020'.
- [10] D. Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar and J. K. Ahmad Dahlan KompTPI Bonehalang No Benteng -Selayar, 'REVISI RENCANA STRATEGIS'.
- [11] N. A. Dahlan, "https://www.academia.edu/," 2021. [Online]. Available: https://www.academia.edu/44851144/Peningkatan_Kesejahteraan_Nelayan_di_Kabupaten_Kepulauan_Selayar.
- [12] M. Prof. Dr. H. Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Ekonomi Maritim*, 2013.
- [13] Badan Pusat Statistik Kabupaten Selayar, "https://selayarkab.bps.go.id/," 2022. [Online]. Available: <https://selayarkab.bps.go.id/>. [Accessed 20 October 2023].
- [14] S. Cristiani, "https://www.scribd.com/," [Online]. Available: <https://www.scribd.com/document/381233262/Kebijakan-Kelautan-Indonesia-pdf?cv=1>. [Accessed 19 October 2023].
- [15] Suyanti and Z. Fix Nurfadholi, 'Kelemahan Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia dan Cara Mengatasinya', *Dinamika Bahari*, vol. 2, no. 1, pp. 13–27, May 2021, doi: 10.46484/db.v2i1.269.
- [16] T. Doang and C. S. Maritim, 'PELAUTKAH ORANG SELAYAR', 2014.
- [17] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar , "https://selayarkab.bps.go.id/," 28 February 2023. [Online]. Available:

- <https://selayarkab.bps.go.id/>.
- [18] BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
"https://selayarkab.bps.go.id/," 7 March 2022. [Online]. Available:
<https://selayarkab.bps.go.id/pressrelease/2022/03/07/31/persentase-penduduk-miskin-kabupaten-kepulauan-selayar-pada-maret-2021-sebesar-12-45-persen.html>.
- [19] BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SELAYAR,
"https://selayarkab.bps.go.id/," 14 August 2023. [Online]. Available:
<https://selayarkab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-kabupaten-kepulauan-selayar.html>.